

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam mengukur keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dalam mengurangi angka kemiskinan, menggunakan hasil penelitian dengan menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap indikator model kebijakan menurut van metter dan van horn (2019:142) :

5.1 Ukuran dan Tujuan kebijakan

Standar sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisasikan dengan mudah (Rahmat Said, 2017). Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bukti Indonesia berkomitmen dalam Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Menurut Purwanto (2013), Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Kebijakan PKH sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakannya. Kebijakan PKH dilaksanakan di setiap kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Subang menjalankan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) semenjak awal program tersebut terbentuk sejak tahun 2007. Saat ini yang melandasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan telah dibentuk Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Melalui PKH, Keluarga Miskin (KM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan.

Dalam pelaksanaan PKH di Kabupaten Subang indikator keberhasilan dilihat dari penerima bantuan PKH yang memutuskan untuk Graduasi Mandiri (GM), dimana berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Dalam hal ini upaya Dinas Sosial untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pembinaan kepada KPM dan juga SDM PKH yaitu pendamping PKH. pembinaan ini dimana Dinas Sosial menguatkan kembali para KPM bahwa apabila KPM sudah dapat dikategorikan mampu untuk menyatakan keluar dari program PKH. Selain itu juga Dinas Sosial melakukan turun lapangan dalam pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Selain pembinaan ini dilakukan kepada KPM PKH, pembinaan ini dilakukan kepada SDM PKH yaitu pendamping PKH, berupa arahan seperti meningkatkan tupoksi dan kode etik pendamping PKH, karena pendamping PKH sangat berperan penting dalam pelaksanaan PKH. Namun sampai saat ini pelaksanaan PKH di Kabupaten Subang belum sepenuhnya mencapai sasaran, jika mengacu pada sasaran tersebut, maka implementasi PKH di Kabupaten Subang belum optimal, Dinas Sosial menyatakan bahwa pada tahun 2020 dari total 72.000 KPM PKH di Kabupaten Subang yang menyatakan berakhirnya sebagai kepesertaan PKH hanya 3.000 KPM. Dalam penerima bantuan PKH pada desa Bongas yang telah menerima bantuan lebih dari tiga tahun, lebih dari sekitar 50 KPM yang termasuk dalam rumah tangga transisi, rumah tangga transisi ini diwajibkan mengikuti kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan memperoleh pengetahuan mengenai ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan dapat mengubah perilaku dan meningkatkan kemandirian KPM, sedangkan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dari keseluruhan total penerima bantuan PKH memutuskan untuk Graduasi Mandiri (GM) hanya sebanyak 10 KPM PKH, yang dimana tidak sampai 50% dari total KPM yang telah menerima bantuan lebih dari tiga tahun dan diwajibkan dalam kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2). Mengartikan bahwa tujuan PKH untuk merubah perilaku KPM belum terealisasi secara maksimal.

Pada Desa Bongas sendiri masyarakat sudah menegenetahui dengan di adakannya suatu Program Keluarga Harapan (PKH) ini, terkait penerimaan masyarakat mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) menurut hasil wawancara tidak ada keterbatasan pengetahuan tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dari sisi perangkat desa dan pendamping PKH. karena PKH ini sudah berjalan cukup lama di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, sehingga masyarakat sudah mengetahui terkait program bantuan ini.

Hambatan dalam pelaksanaan PKH di Desa Bongas sehingga belum berjalan optimal karena masih banyak masyarakat kurang mampu belum menerima bantuan, hal ini dikarenakan terjadi penurunan penerima bantuan PKH di Desa Bongas karena terkendala pada pendataan masyarakat yang sering kali bermasalah, masyarakat untuk menerima bantuan harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan basis data para calon penerima bansos dari Kemensos, termasuk penerima PKH. mulai tahun 2017 dikembangkan aplikasi SIKS-NG yang digunakan untuk mengelola data Terpadu yang diberi nama data program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu (DT-PPFM dan OTM) serta data Program Perlindungan Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). setiap tahun diperbaiki sistem mekanismenya, dan cakupan datanya. DTKS dengan aplikasi SIKS-NG yang digunakan sekarang sudah semakin ke arah lebih baik karena ditunjang oleh teknologi berupa pemanfaatan aplikasi, karena itu banyak KPM di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tidak dapat menerima bantuan karena tidak terdaftar pada DTKS yang disebabkan banyak kemungkinan, seperti No. NIK tidak sesuai dengan Kartu Keluarga (KK), atau belum memperbarui Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mulai dengan menggunakan aplikasi SIKS-NG sekarang sistem dapat mendeteksi ketika KK atau KTP belum diperbarui, sehingga terjadi penurunan KPM dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikatakan juga oleh KASI Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pamanukan bahwa banyak masyarakat yang mengalami kendala tersebut. KPM yang tidak menerima bantuan seperti ini menjadi penghambat dalam mencapai sasaran dimana KPM memutuskan Graduasi Mandiri

(GM), karena KPM sendiri tidak mendapat bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Sehingga tujuan program guna penanggulangan kemiskinan dengan memberikan bantuan, dengan realita masih banyak kendala dalam pelaksanaannya seperti banyak masyarakat yang belum menerima bantuan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dari hasil wawancara pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan maka dapat dikatakan proses ukuran dan tujuan kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum berjalan dengan maksimal.

5.2 Sumber Daya

Dengan menggunakan teknik triangulasi yang didapatkan dari hasil wawancara dan observasi, Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan target tingkat kemiskinan menjadi 7% hingga 6,5% pada akhir tahun 2024. Karena itu, PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai program nasional penurunan kemiskinan harus dapat mewujudkan target yang telah dicanangkan Presiden. Dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Subang menyatakan bahwa tidak memiliki target waktu graduasi mandiri KPM PKH, melihat fakta bahwa masih banyak kendala dalam administrasi kependudukan yang menyebabkan banyaknya KPM PKH tidak dapat menerima bantuan, sehingga hal ini mengakibatkan menghambat penurunan angka kemiskinan yang ditargetkan oleh Kementerian Sosial.

Tanpa adanya sumber daya finansial yang mencukupi untuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), maka kebijakannya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk sumber dana anggaran Pendamping PKH mengatakan bahwa dalam implementasi PKH yang diberikan kepada KPM semua berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dana yang disalurkan dalam pendistribusian ini sesuai dengan jumlah KPM penerima di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Selain dana dari APBN terdapat juga bantuan berupa insentif untuk para pendamping dalam pelaksanaan PKH yang berasal dari APBD. Adanya APBD ini merupakan respon daerah dari dorongan

Kementrian Sosial agar mengalokasikan dana untuk pelaksanaan PKH di daerah, Anggaran berasal dari APBD ini belum berjalan dengan maksimal karena kendala dari teknis keuangan daerah saja, menyesuaikan dengan keuangan daerah.

Setelah adanya sumber daya finansial yang mencukupi, kebijakan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak adanya sumber daya manusia yang memumpuni untuk menjalankan suatu kebijakan. Untuk Sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi PKH ini Dinas Sosial Kabupaten Subang mengatakan bahwa bersifat relatif, disesuaikan dengan jumlah KPM masing-masing dikecamatan, kalau disimpulkan dengan satu kabupaten sekitar 200 SDM PKH, tarafnya mencukupi untuk menjalankan kebijakan tersebut, tetapi apabila mengerucut sampai dengan desa akan dikatakan relatif karena pembagian pendamping tidak sepenuhnya merata, masih terdapat desa yang mengalami kekurangan dan kelebihan pendamping tidak menyesuaikan KPM yang menerima bantuan pada desa tersebut. Pada desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang jumlah pendamping sebanyak satu orang dengan jumlah KPM terbanyak pada tahun 2021 sebanyak 300 KPM. Dalam hal ini pendamping PKH di Desa Bongas tarafnya dengan total KPM tersebut tarafnya cukup untuk melaksanakan PKH, tetapi melihat fakta dilapangan terjadi suatu hal diluar kendali seperti di Desa Bongas dimana pendamping PKH mengalami kondisi yang tidak baik, dan hanya terdapat satu pendamping maka hal ini mengakibatkan peran pendamping tidak maksimal dalam pelaksanaan PKH. maka dengan jumlah pendamping tersebut kenyataannya tidak cukup. Pendataan yang dilaksanakan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dilakukan oleh KASI Kesejahteraan Desa Bongas sendiri, jumlah penduduk di Desa Bongas sebanyak 2.200 KK dengan jumlah angka kemiskinan sebanyak 1.055 KK, dalam pelaksanaan pendataan ini seharusnya terdapat operator desa sendiri tidak merangkap dengan KASI Kesejahteraan desa tetapi dikarenakan keterbatasan anggaran dana desa dalam hal ini KASI Kesejahteraan merangkap menjadi operator desa sehingga dimana hanya satu orang dalam melaksanakan pendataan, meskipun begitu KASI Kesejahteraan Desa Bongas tetap melaksanakan tugasnya dengan maksimal, fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan pendataan juga sudah memadai dalam

melaksanakan pendataan, pada tahun 2021 KASI sendiri mengusulkan sekitar 800 KK sebagai penerima bantuan sosial tetapi hanya 300KK yang berhasil terdaftar, hal ini karena tidak didukung dengan kondisi masyarakat dalam memperbaiki administrasi kependudukan yang menghambat dalam pelaksanaan pendataan, dalam hal ini menunjukkan bahwa di Desa Bongas sumber daya manusia sudah cukup tetapi jika terdapat penambahan sumber daya manusia jauh lebih baik.

5.3 Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi mempengaruhi implementasi suatu program (Ceria Cantika, 2019). Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus diiringi dengan agen pelaksana yang mendukung sesuai dengan kebutuhan cakupan, Sekitar 200 SDM PKH di Kabupaten Subang dan terbilang cukup untuk pelaksanaannya, tetapi agen pelaksana di Kabupaten Subang belum tersebar secara merata karena masih terdapat ketidaksesuaian kebutuhan KPM di tiap Desa. Meskipun belum tersebar secara merata tetapi pada Desa Bongas Kecamatan Pamanukan dalam hal ini sudah sesuai dengan kebutuhan, karena jumlah KPM yang tidak terlalu banyak sehingga cukup dengan satu pendamping PKH.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus diiringi dengan agen pelaksana yang mendukung, termasuk bagaimana cara komunikasi dalam implementasi PKH ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Pelaksanaan PKH ini tidak semua stakeholder memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya KPM PKH, pihak Kecamatan Pamanukan sendiri mengatakan bahwa informasi kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pendamping PKH, segala macam informasi diberikan oleh pendamping PKH karena pendamping yang berkoordinasi langsung dengan KEMENSOS ataupun Dinas Sosial. Pihak Kecamatan hanya hadir jika memang adanya undangan dalam acara PKH oleh pihak-pihak desa atau pendamping PKH.

Perangkat Desa sendiri juga mengatakan untuk sosialisasi sendiri jika pendamping melaksanakan sosialisasi perangkat desa maka akan turun lapangan, tetapi jika pendamping tidak melakukan sosialisasi perangkat desa juga tidak turun lapangan, karena pendampingan KPM yang merupakan program KEMENSOS hanya melibatkan pendamping PKH, hal ini mengartikan bahwa peran penting dalam sosialisasi ini di Pendamping PKH itu sendiri.

Dalam sosialisasi PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, sosialisasi sebagai bentuk pendampingan ini sendiri tidak dilaksanakan rutin oleh pendamping PKH kepada KPM PKH, dikarenakan pendamping PKH di Desa Bongas sangat jarang turun lapangan ke Desa karena beberapa kali dalam kondisi yang tidak baik, sedangkan PKH merupakan program bukan hanya memberikan berupa bantuan tunai, tetapi juga untuk mengubah pola perilaku masyarakat, sehingga Kemensos memberikan edukasi sebelum pendamping turun lapangan dengan pendidikan dan pelatihan melalui Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kemensos RI, pelatihan ini hanya diikuti pendamping PKH sendiri yang bertujuan dapat memotivasi KPM saat dilapangan, tetapi pendampingan yang dilakukan oleh Pendamping PKH tidak dilakukan dengan maksimal sehingga pendamping juga tidak memberikan motivasi kepada peserta PKH dalam menjalankan komitmennya. Pertemuan bulanan dengan ketua kelompok dan seluruh peserta PKH juga tidak dilakukan oleh petugas PKH. Sehingga dalam hal ini pemahaman dalam pelaksanaan PKH belum sepenuhnya sampai ke masyarakat. Tidak tersampainya dengan baik pemahaman para KPM dengan hal ini mempengaruhi derajat perubahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), pengetahuan yang harus didapatkan guna merubah pola perilaku masyarakat menjadi terhambat, kemudian edukasi bagaimana meningkatkan keuangan keluarga yang harusnya diberikan saat pertemuan karena tidak dilaksanakan sehingga derajat perubahan yang terjadi di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tidak terlalu signifikan.

Bahwa disimpulkan pada dimensi ini Kabupaten Subang belum tersebar pendamping PKH secara merata, tetapi pada Desa bongas Kecamatan Pamanukan

Kabupaten Subang sudah sesuai dengan cakupan. Kemudian peran penting dalam melakukan sosialisasi adalah pendamping PKH, tetapi pendamping sendiri tidak melaksanakan sosialisasi tersebut, sehingga dalam hal program belum berjalan dengan maksimal, karena melihat agen pelaksana belum sepenuhnya menjalankan program.

5.4 Kecenderungan Pelaksana

Dari hasil mengenai sikap dan kecenderungan ialah sikap yang di tampilkan adalah sikap penerimaan dari berbagai implementor yang terkait dengan Program Keluarga Harapan mulai dari Dinas Sosial, Kecamatan Pamanukan, Pendamping PKH, Perangkat Desa dan masyarakat. Para stakeholder memberikan tanggapan baik karena merasa program ini membantu masyarakat kurang mampu, walaupun pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) belum berjalan maksimal di berbagai bidang tetapi para pelaksana terus mengupayakan perbaikan dalam pelaksanaannya.

Sikap penerimaan Dinas Sosial Kabupaten Subang dalam kebijakan Program Keluarga Harapan, Dinas Sosial Kabupaten Subang merasa bahwa Program Keluarga Harapan ini seharusnya menjadi prioritas program, namun pelaksanaannya belum karena informasi program ini belum menyeluruh. Dinas sosial juga terus memaksimalkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Subang, untuk sekarang dalam pelaksanaan PKH belum melibatkan dukungan dari kelompok dunia usaha, dinas sosial terus mengupayakan karena melihat terdapat potensi tersebut, di Kabupaten Subang banyak perusahaan dan pabrik-pabrik yang memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan PKH ini, disebagian daerah telah menerapkan hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Subang berharap di tahun ini atau di waktu lain dapat merangkul semua pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kemudian sikap penerimaan untuk mendukung PKH ini dan mewujudkan tujuan PKH menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Subang merasa perlu program lanjutan bagi masyarakat yang telah memutuskan graduasi mandiri, graduasi mandiri merupakan berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena

kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu sehingga sudah tidak layak lagi mendapatkan bantuan sosial PKH. Pada tahun 2020 sekitar 3000 KPM yang memutuskan graduasi mandiri, namun tidak lama mengalami pandemi Covid-19 dan ingin kembali menjadi KPM PKH, sehingga dinas sosial sadar bahwa masyarakat masih perlu bimbingan meskipun sudah memutuskan berakhirnya kepersertaan menjadi KPM PKH.

Pada upaya memaksimalkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, Sikap penerimaan perangkat desa terus mengupayakan agar masyarakat mengurus administrasi kependudukan karena banyak masyarakat di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang banyak yang belum memiliki kesadaran akan hal tersebut, sehingga masyarakat tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sama dengan sikap penerimaan pendamping PKH dalam hal ini, merasa perlu adanya kolektif untuk masyarakat yang memanggul belum memperbaiki administrasi kependudukannya, seperti mendata masyarakat yang terkendala dalam hal ini, sehingga administrasi kependudukan diharapkan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas.

Dengan demikian dilihat dari sikap pelaksana mendukung Program Keluarga Harapan (PKH) dan menunjukkan sikap penerimaan dari agen pelaksana bahkan kebijakan ini menurut Dinas Sosial Kabupaten Subang harus dijadikan program prioritas dan harus ada program lanjutan guna menurunkan angka kemiskinan, walaupun banyak kendala dalam implementasinya di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan kabupaten Subang para pelaksana mengupayakan masyarakat dapat menerima bantuan dan terbantu dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH).

5.5 Komunikasi Antar Organisasi

Dalam melakukan komunikasi untuk menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) ini memang harus mempunyai taraf komunikasi yang baik antar sesama implementor Program Keluarga Harapan (PKH). (Isdijoso, DKK, 2018)

Koordinasi antar stakeholder, peran Dinas Sosial Kabupaten Subang menyampaikan komunikasi dengan mensosialisasikan yang menjadi kebijakan pusat dalam hal ini pada khalayaknya, seperti seluruh stakeholder, KPM, pendamping sosial, dan lain-lainnya. Dalam penyampaian komunikasi antar stakeholder dilaksanakan rapat rutin oleh Dinas Sosial setiap bulan yang dinamakan apel, dimana pendamping dikumpulkan dibagi beberapa kecamatan untuk berbagi informasi bagaimana kondisi dilapangan, kemudian dalam apel tersebut juga memberi informasi terbaru jika ada, Pendamping PKH juga mengatakan bahwa jika terdapat informasi atau kondisi tertentu bahwa akan diadakan rapat mendadak. Saat ini rapat rutin pada dua tahun terakhir saat pandemi Covid-19 tetap dilaksanakan dengan via zoom, atau beratap muka langsung dengan mengirimkan koordinator masing-masing kecamatan dengan prokes yang ketat. Monitoring sendiri dalam pelaksanaan PKH ini dilakukan oleh PPKH (Pelaksana Program Keluarga Harapan), monitoring dilaksanakan berupa pembinaan pendamping dan penerima bantuan, jadi segala kebijakan jika terdapat perubahan, PPKH turun lapangan apa saja kendala yang ada dilapangan.

Menurut hasil observasi komunikasi ini berjalan baik antara Dinas Sosial dengan pendamping PKH, akan tetapi di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang kurang berjalan dengan maksimal antara pendamping dengan perangkat desa, karena dalam pelaksanaannya pendamping dan perangkat desa kurang berkoordinasi, pendamping dan perangkat desa juga melakukan koordinasi hanya lewat media online belum bertemu atau bertatap muka, dikarenakan terkendala dengan kondisi pendamping PKH di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, karena pendamping PKH sendiri belum melakukan turun langsung lapangan sehingga sosialisasi yang dilakukan kepada perangkat desa belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal, sehingga apa saja program PKH tidak sepenuhnya diketahui oleh perangkat desa di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Tanpa sosialisasi yang cukup memadai, tujuan kebijakan tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, koordinasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan.

Dengan hal ini dalam dimensi komunikasi antar organisasi dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik.

5.6 Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Dalam menjalankan setiap program terdapat tujuan yang ingin dicapai, dan terdapat alasan mengapa program tersebut dilaksanakan, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan. Secara keseluruhan di Kabupaten Subang mata pencaharian masyarakat dibidang pertanian, sehingga pendapatan masyarakat tidak menentu setiap bulan. Sama halnya di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, pendapatan masyarakat hampir keseluruhan sebagai buruh tani, maka dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat merasa terbantu secara perekonomian. Dengan ini menunjukkan bahwa implementasi Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan sasaran karena di Desa Bongas Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang didominasi oleh masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap karena hanya sebagai penggarap bukan pemilik lahan.

Dengan kondisi mata pencaharian penduduk sebagai buruh tani, dan keadaan ekonomi masyarakat di Desa Bongas yang tidak tetap, maka dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) ini membantu ekonomi masyarakat khususnya di bidang Pendidikan dan Kesehatan. Tetapi karena sekarang pendataan dapat mendeteksi ketidak sesuaian administrasi kependudukan, banyak masyarakat yang tidak dapat menerima bantuan, oleh karna itu implementasi PKH di Desa Bongas sasarannya sudah tepat tetapi belum didukung dengan kondisi sosial masyarakat. Bagi masyarakat yang dapat menerima bantuan PKH di Desa Bongas merasa terbantu dengan adanya bantuan untuk Pendidikan dan Kesehatan, masyarakat dapat menggunakan bantuan untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan, seperti perlengkapan sekolah dan biaya sekolah, selain itu KPM juga dengan bantuan tersebut mendapat pelayanan kesehatan seperti posyandu, dan pemenuhan gizi anak. tetapi masih terdapat juga masyarakat yang menghambat implementasi

kebijakan PKH di Desa Bongas yaitu beberapa masyarakat yang memang belum peka untuk anaknya meneruskan sekolah, atau anaknya untuk diperiksakan diposyandu, meskipun secara umum sudah banyak, tetapi masih terdapat masyarakat yang artinya tidak sesuai dengan harapan.

Dalam pelaksanaan PKH tanpa adanya dukungan dari pemerintah daerah implementasi PKH ini tidak akan berjalan dengan baik, secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Subang sangat mendukung PKH ini, Kementerian Sosial mendorong pemerintahan daerah untuk mengalokasikan dukungan supportif 5% untuk kebutuhan fasilitas program PKH di daerah masing-masing, dan di Kabupaten Subang telah menerapkan insentif tersebut untuk mewujudkan program PKH itu sendiri, selain pendamping PKH mendapatkan gaji dari kementerian, pendamping juga mendapatkan insentif tambahan dari daerah, walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya, tetapi dalam anggaran sudah dilaksanakan.